



Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2003-2008

Yakobus Riwi Wijaya ✉, **Abdul Muntholib**

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2016
Disetujui September 2016
Dipublikasikan Oktober 2016

Keywords:

development, KPUD of Central Java Province, and the organizer of the General Election (Election).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan lingkup temporalnya mengambil tahun 2003 karena pada tahun tersebut KPUD Provinsi Jawa Tengah terbentuk dengan kepengurusan periode pertama dengan masa bakti baik dari para anggota dan Ketua komisioner KPUD Provinsi Jawa Tengah dari Hasyim Asy'ari ke Fitriyah karena masalah internal. Hasil dari penelitian ini adalah sejarah awal mula terbentuknya KPUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta baik tugas, wewenang, kewajiban, serta hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2004, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Abstract

This study aims to explain the development of the Central Java Provincial Election Commission as the organizer of the General Election. This research uses historical research method consisting of four stages, namely: heuristic, source critic, interpretation, and historiography. The spatial scope in this study is Central Java Province, while the temporal sphere takes the year 2003 because in that year KPUD of Central Java Province was formed with first period stewardship with good period of service from members and Chairman of Central Java KPUD commissioner from Hasyim Asy'ari to Fitriyah because of internal problems. The result of this research is the history of the beginning of the establishment of KPUD of Central Java Province in 2003, as well as the duties, authorities, obligations, and the result of the 2004 Legislative Elections (Pileg), and the Presidential Election in 2004 as the organizer of the General Election (Pemilu) in the province of Central Java.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Dimulai atas desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis setelah mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 16 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Presiden BJ. Habibie pertama kalinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk yang dimana sebelumnya bernama LPU (Lembaga Pemilihan Umum) yang dibentuk oleh Presiden Soeharto tahun 1970. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yakni meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD baik tingkat Kota, Kabupaten maupun Provinsi, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Sodikin, 2014: 51).

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu baik yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara demokratis pada tahun 1955, juga Pemilu yang dilaksanakan pertama kalinya untuk memilih Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Dari Pemilu tahun 1955 sampai dengan 2004 telah dilaksanakan selama 9 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 (Dasim Budimansyah & Dikdik Baehaqi Arif, 2008:5).

Demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur, adil, dan demokratis dan tidak hanya mencakup nasional melainkan juga merata ke berbagai daerah khususnya wilayah Provinsi di seluruh Indonesia. Maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat Provinsi oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh KPU Pusat sekaligus dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Surat Keputusan (SK) setempat. Sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi khususnya di Jawa Tengah, KPUD juga akan membentuk tim seleksi guna mensukseskan Pemilu baik ditingkat Kota maupun Kabupaten yang ada di

seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (Toni Adrian, 2006: 80).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dengan berbagai sumber yang diperoleh baik dari tokoh-tokoh yang terkait pada masa kepemimpinannya sebagai salah satu anggota komisioner KPUD Provinsi Jawa Tengah kepengurusan tahun 2003-2008, buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi, arsip-arsip baik di media cetak atau koran lokal yang beredar di sekitar Provinsi Jawa Tengah, juga dari website, serta arsip-arsip yang langsung berada dan disimpan di kantor KPUD Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Suhartono W. Pranoto, 2010: 9-11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum (Agust Riewanto, 2007: 33).

Dibentuknya KPU Pusat yang pertama kalinya dilakukan oleh Mantan Presiden BJ. Habibie, KPU sendiri melakukan tugas, kewenangan, serta kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang diawali dengan membentuk KPU baik di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten oleh tim

seleksi yang ditunjuk oleh KPU Pusat guna mensukseskan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan demokratis (Ning Retnaningsih, 2006: 45).

Tim Seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk, dengan ketua Prof Ir Eko Budihardjo MSc (Rektor Undip) dan Wakil Ketua Tartopo Soenarto SH (Asisten Tata Praja Sekda Prov Jateng). Sedangkan anggota terdiri atas Prof Dr Amin Syukur (dosen IAIN Walisongo Semarang), Dr Agnes Widanti SH CN (dosen Unika Soegijopranoto Semarang), serta Sasongko Tedjo SE MM (Wapemred Suara Merdeka). Tim dibentuk melalui SK Gubernur No 270/11/2003 tertanggal 3 April 2003. Mulai beberapa hari kemudian, tim sudah membuka kesempatan kepada seluruh warga Jateng untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran ditutup sekitar bulan April pada tanggal 10 tahun 2003.

Seleksi tahap pertama menjangkit 30 calon anggota KPU dari 88 calon yang lolos seleksi dengan jumlah 216 pendaftar. Dari calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah yang lolos seleksi tahap pertama mengikuti uji kelayakan tahap kedua. Uji pertama berlangsung di kantor KPUD Jawa Tengah Jalan Veteran III itu, kemarin mengikutkan 20 calon. Sisanya dilanjutkan Rabu (30/4) pukul 18.30 di tempat yang sama. Mereka akan dipilih menjadi 10 besar untuk diajukan ke KPU Pusat. Uji kelayakan dihadiri pula oleh akademisi, anggota LSM, dan pengurus partai politik. Selain dari tim seleksi, hadirin juga diperbolehkan mengajukan berbagai pertanyaan. Jalannya uji kelayakan tersebut tidak diketahui oleh calon anggota KPU Jawa Tengah yang lainnya. Sebelum dipanggil, peserta dikarantina di ruangan lantai I. Mereka dipanggil untuk menjalani tes di lantai III sesuai dengan nomor urutnya masing-masing (Sumber Data: Arsip Suara Merdeka, 30 April 2003 :XII).

Para calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mulai dites wawancara tahap pertama oleh tim seleksi,

Senin (28/5), di Gedung Kopri. Setiap calon dites dalam lima materi oleh tim yang berjumlah lima orang secara bergantian satu persatu. Setiap pemanggilan oleh panitia wawancara, langsung lima calon. Sementara calon yang lain menunggu di luar gedung. Setiap calon harus berhadapan dengan kelima anggota tim seleksi, masing-masing kurang lebih lima menit. Setiap anggota tim memiliki meja sendiri – sendiri yang letaknya cukup berjauhan. Dengan demikian, bisa dipastikan ketika wawancara berlangsung, masing-masing calon tidak bisa saling mendengarkan materi yang ditanyakan. Begitu juga dengan peserta yang menunggu di luar. Jangan kan mendengar, terlihat dari kursi saja tidak. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Drs. Masrohan Bahri MM mengatakan, tes wawancara tahap pertama dilakukan dua hari. Dari 88 calon yang lolos seleksi, 60 dites Senin (28/4), sedangkan sisanya Selasa (29/4). Demikian hasilnya baru bisa diketahui paling cepat sore harinya. Dengan materi yang ditanyakan, ungkap Beliau, meliputi Pancasila dan UUD 1945, UU No 31/2002 tentang Partai Politik, UU No 12/2003 tentang Pemilu, pengetahuan umum (otonomi daerah dan wawancara mengenai wawasan mengenai Kota Semarang), serta integritas dan kualitas. Tes wawancara untuk materi pertama dilakukan di Meja 1 oleh Ketua Tim Seleksi Drs. KH Syamsuddin Anwar. Untuk materi kedua Drs. Sri Santoso (meja 2), ketiga Nafiz Yunaliya (3), keempat Herniwati (4), dan kelima Atyadi Mochtar (5) (Sumber Data: Arsip Suara Merdeka, 30 April 2003: VIII).

Pada tanggal 24 Mei, kelima anggota yang sudah lolos seleksi dan dilantik Ketua KPU Pusat Prof Dr Nazarudin Syamsudin di Hotel Indonesia, Jakarta. Kelima anggota tersebut antara lain meliputi: Hasyim Asy'ari SH.Msi, Dr Ari Pradhanawati MS, Dra Fitriyah MA, Ida Budhiati SH, dan Slamet Sudjono SH. MH. Mereka kemudian ke kantor KPU Jateng di jalan Veteran 1 A Kota Semarang.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di jalan Veteran 1 A Kota Semarang dalam tiap – tiap ruangnya terdiri dari beberapa bagian,

meliputi bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya bagian program, data, organisasi dan sumber daya manusia mempunyai fungsi sebagai menyiapkan program dan data serta juga sebagai penataan organisasi dan sumber daya manusia. Dilanjut dengan bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai fungsi sebagai perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta juga sebagai pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Kemudian yang terakhir bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat, mempunyai fungsi sebagai menyiapkan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum. Serta juga sebagai penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

SIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008 dibentuk atas hasil dari proses penyeleksian oleh tim seleksi calon anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah, dengan Ketua tim seleksi Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc (Rektor Undip) dan Wakil Ketua Tartopo

Soenarto, SH (Asisten Tata Praja Sekda Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan anggota tim seleksi lainnya terdiri atas Prof. Dr. Amin Syukur (Dosen IAIN Walisongo Semarang), Dr. Agnes Widanti, SH. CN (Dosen Unika Soegijoranoto Semarang), serta Sasongko Tedjo, SE. MM (Wakil Pemimpin Redaksi Suara Merdeka). Tim dibentuk melalui SK Gubernur No. 279/11/2003 tertanggal 3 April 2003. Berbagai proses terkait penyeleksian anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah akhirnya menghasilkan lima (5) anggota yang sudah lolos dari berbagai penyeleksian dan dilantik oleh Ketua KPU Pusat yaitu Prof. Dr. Nazarudin Syamsudin di Hotel Indonesia pada tanggal 24 Mei 2003. Kelima anggota tersebut antara lain meliputi: Hasyim Asy'ari SH. Msi selaku Ketua KPU Jawa Tengah periode tahun 2003-2008, Dr Ari Pradhanawati MS, Dra Fitriyah MA, Ida Budhiati SH, dan Slamet Sudjono SH. MH. Pada tanggal 26 Mei lima anggota KPU Jateng menghadap Gubernur H Mardiyanto. Mereka kemudian ke kantor KPU Jateng di Jl Veteran 1 A melakukan pleno memilih ketua. Dan atas hasil kesepakatan antar anggota, Hasyim Asy'ari dipercaya menjabat sebagai Ketua KPUD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003-2008.

Kemudian dalam kinerja KPUD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008 mempunyai tugas, kewenangan, serta kewajibannya sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Jawa Tengah, yang diawali membentuk tim seleksi terhadap calon anggota KPUD baik di Kabupaten dan Kota yang terdapat di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Setelah proses tersebut dan akhirnya menghasilkan berbagai anggota KPUD Kabupaten dan Kota, KPUD Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai tugas lainnya yang meliputi penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2004 baik terhadap DPR RI, DPD dan DPRD ditingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Selain itu, juga mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 untuk pertama kalinya serta dalam Pilpres tersebut menghasilkan dua (2) putaran

baik ditingkat Provinsi maupun Nasional. Berikut hasil dua (2) putaran Pilpres ditingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari putaran pertama (1) dimenangkan oleh pasangan Capres – Cawapres nomor urut dua (2) yaitu Mega - Hasyim dengan jumlah suara 5.807.127 pemilih dengan nilai presentase mencapai 31, 81% suara ditingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli tahun 2004. Dikarenakan hasil Pilpres kelima (5) Capres dan Cawapres baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional tidak ada salah satu calon yang suaranya mencapai 40 – 50% suara, akhirnya dilaksanakanlah putaran kedua (2) tetapi oleh dua pasangan calon saja baik dari nomor urut 2 dan 4. Dan pada putaran kedua (2) baik ditingkat Provinsi maupun nasional dimenangkan oleh pasangan nomor urut empat (4) yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – M. Jusuf Kalla dengan perolehan suara tingkat Provinsi sekitar 8.991.744 pemilih dengan nilai presentase mencapai 51,67% suara pada tanggal 30 September 2004. Dilanjut dengan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2008 yang diikuti oleh lima (5) pasangan calon, dengan mencakup 10 Daerah Pemilihan (Dapil) yang meliputi 35 Daerah baik ditingkat Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan akhirnya pada penyelenggaraan Pilgub tahun 2008, dimenangkan oleh pasangan nomor urut empat (4) yaitu H. Bibit Waluyo dan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dengan memperoleh suara 6.084.261 pemilih serta dengan nilai presentase mencapai 43,44% di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2008.

Selama kepengurusan KPUD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008 juga mengalami berbagai hambatan – hambatan sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah, baik ditingkat internal dan eksternalnya. Ditingkat internalnya, dengan mundurnya Ketua KPUD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2003 – 2008 Hasyim Asy'ari yang diawali oleh mosi tidak percaya oleh anggota – anggota lainnya atas ketidak profesionalitas Beliau selama menjabat dan diganti oleh Dra. Fitriyah, MA atas kesepakatan

hasil bersama dengan anggota – anggota KPUD Provinsi Jawa Tengah lainnya. Sedangkan ditingkat eksternalnya, meliputi dengan berbagai pengaduan masyarakat atas indikasi – indikasi kecurangan yang dilakukan oleh berbagai tim sukses beberapa calon serta keterlambatan dalam penanganan logistik terkait sebagai penyelenggaraan Pemilu baik ditingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Toni. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Pustaka.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Budimansyah, Dasim. dan Baehaqi, Arif. 2008. *Pemilihan Umum*. Bandung: Genesindo.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ma'ruf, Arif. 2014. *Reformasi Birokrasi: Pelayanan Prima KPU*. Jakarta: Nusantara Publishing.
- Retnaningsih, Ning. 2006. *Etika, Politik dan Demokrasi: Dinamika Politik di Indonesia*. KDT Percik.
- Riewanto, Agust. 2007. *Ensiklopedi Pemilu: Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Sae, Willy. 2008. *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Jakarta: Mitra Print.
- Sundari, Sri. 2015. *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Bestari Pustaka.
- Suwarno. 2012. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Ombak Dua Pustaka.
- Yasin, Rahman. 2015. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta: LP2AB Pustaka.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang. Universitas Negeri Semarang Press.